



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling. 51, Jakarta 12950 Telp. 021-29410445  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor: (diisi oleh petugas)

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan)\*

NIK : .....

Alamat : .....

.....

.....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/HP : .....

Surel : .....

Rincian Informasi yang dimohonkan : .....

.....

.....

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

.....

.....

.....

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*

2.  Mendapatkan Salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\* : 1.  Mengambil Langsung

2.  Pos

3.  Surat Elektronik

4.  Lainnya: .....

Dengan ini mengajukan permohonan informasi, dan bersedia menaati tata cara permohonan informasi sesuai Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, (tanggal) / (bulan) / (tahun)

Mengetahui,

**Petugas**

**Pemohon Informasi**

(.....)

Nama & Ttd.

(.....)

Nama & Ttd.

\* Coret yang tidak perlu.

\*\* Pilih salah satu.

### Hak-hak Pemohon Informasi

#### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan  **pemberitahuan tertulis**  tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan  **keberatan**  kepada  **atasan PPID**  dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan  **keberatan**  kepada  **Komisi Informasi**  dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.